

BAGIAN TIGA

Repository University of Riau <https://repository.unri.ac.id>

 Hak cipta milik Universitas Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





depan sangat diperlukan kebijakan yang benar-benar strategis bagi mengungkai benang kusut ini. Perbaikan infrastruktur mutlak diperlukan guna mengurangi ongkos produksi dan mahalny harga barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan petani. Jalan-jalan ke sentra produksi dan pemukiman penduduk harus diperbaiki sehingga kualitas hasil produksi pertanian dapat terjamin sampai ke pasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



KESAJAHTERAAN PETANI RIAU

Jumlah masyarakat Riau yang hidup disektor pertanian sangat dominan. Sampai tahun 2013 rumah tangga yang bekerja disektor pertanian mencapai 581.520 rumah tangga. Berdasarkan data yang dilansir BPS Riau jumlah petani yang memang bekerja di sektor pertanian sebanyak 684.570 orang dan sebagian besar adalah bekerja di sub-sektor perkebunan yakni 573.050 orang. Kehidupan petani dengan sendirinya akan mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat Riau. Semakin sejahtera para petani maka dapat dikatakan masyarakat Riau kian sejahtera secara umum.

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani adalah melalui Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai ini merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Semakin tinggi NTP maka semakin tinggi kemampuan daya beli atau daya tukar (*term of trade*) petani. Ini berarti naiknya NTP mencerminkan meningkatnya kesejahteraan petani. Bila indeks yang diterima petani lebih tinggi dari indeks yang dibayarkannya maka akan ada kemampuan petani untuk mengembangkan kesejahteraannya pada pola konsumsi yang lebih luas maupun untuk berinvestasi bagi memperbaiki kelayakan hidup dimasa yang akan datang. Sebaliknya bila indeks harga yang diterima petani lebih rendah dari indeks yang harus dibayarkannya maka berarti seluruh pendapatan petani tak mencukupi untuk memenuhi



kebutuhan konsumsi dan produksinya.

Badan Pusat Statistik (BPS) setiap bulan melansir data Nilai Tukar Petani (NTP) ini untuk dapat kita mengevaluasi bagaimana perkembangan kesejahteraan petani dari waktu ke waktu. Mengingat banyaknya masyarakat Riau yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian maka kita ini perlu dicermati dan dianalisa sehingga kebijakan pembangunan dapat diarahkan secara tepat bagi memperbaiki kesejahteraan petani Riau. Dampak perbaikan kesejahteraan petani akan menjaral ke sektor lainnya. Bila NTP melebihi seratus persen dan senantiasa meningkat berarti nilai lebih petani akan mengalir ke sektor lain, yakni perdagangan dan jasa-jasa lainnya. Melihat ekonomi akan semakin membaik jika petani di Riau kian sejahtera.

Pada Maret 2013 Nilai Tukar Petani di Riau mencapai 102,19 yang berarti indeks yang diterima petani masih lebih tinggi dari indeks yang dibayarkannya. Tingginya indeks yang diterima petani banyak disumbangkan oleh tingginya NTP sub-sektor tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Pada tanaman hortikultura nilai tukar petaninya mencapai 115,30 sedangkan pada tanaman pangan sebesar 111,47. Nilai Tukar Petani yang masih rendah adalah pada petani perkebunan rakyat yakni sebesar 92,92 dan nelayan sebesar 91,03. Keadaan ini menggambarkan bahwa pada sub-sektor perkebunan dan nelayan yang merupakan sebagian besar kehidupan masyarakat Riau bergantung kesejahteraannya masih memprihatinkan. Indeks yang mereka terima masih lebih rendah dari indeks yang mereka harus bayarkan. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi masih tidak mampu dicukupi oleh pendapatan yang diperoleh.

Lantas, apakah keadaan tersebut semakin membaik pada Maret 2014? Dari data dapat dibaca bahwa petani Riau ternyata kian tertekan kehidupannya. Nilai Tukar Petani (NTP) secara keseluruhan justru turun menjadi hanya 98,61. Petani Riau kian tidak sejahtera karena pendapatan yang diperolehnya tak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya untuk berkonsumsi dan memproduksi. Seluruh sub-sektor kehidupan petani



NTP-nya tidak melampaui angka 100. NTP pada Tanaman Pangan turun menjadi 88,97 dan Tanaman Holtikultura turun menjadi 98,90. Untuk tanaman perkebunan rakyat memang terjadi sedikit kenaikan menjadi 98,17 namun kondisinya tetap dibawah standar kecukupan sehingga jumlah masyarakat berkebun di Riau yang demikian besar tetap saja terdesak oleh kekurangan kemampuan atau daya beli untuk dapat hidup berkecukupan. Sama halnya dengan para peternak yang nilai tukarnya hanya 97,77 yang pada mulanya mampu mencapai 100,80. Hanya nilai tukar nelayan yang memperlihatkan perbaikan sampai dengan Maret 2014 yakni dari 91,03 naik menjadi 104,62.

Mencermati rendahnya kesejahteraan petani Riau dari semua sub-sektor pada tahun 2014 ini haruslah menjadi isu utama dalam berbagai strategi pembangunan daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menyatukan persepsi dan gerak langkah memperbaikinya. Penyebab tidak membaiknya kesejahteraan petani dipicu oleh dua keadaan yang saling menekan. Pertama, harga komoditas yang dihasilkan petani tidak mengalami perbaikan harga yang signifikan. Harga sawit jika pun meningkat hanya sedikit saja, sedangkan komoditas pangan dan holtikultura belum mampu didongkrak sehingga pendapatan yang diterima petani tidak membaik. Kedua, harga-harga kebutuhan pokok kian meningkat. Kebutuhan konsumsi melonjak sedemikian rupa dan harga-harga faktor produksi melonjak pula. Ini mengakibatkan semua pendapatan petani harus dialokasikan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi. Itupun tidak mencukupi sehingga kualitas kesejahteraan masyarakat petani Riau menyusut secara nyata.

Tidak gampang untuk keluar dari persoalan ini. Pemerintah harus memiliki terapan yang jelas dan terukur. Bukannya memanjakan petani dengan berbagai bantuan yang tidak mendidik sehingga produktivitas masyarakat tidak membaik. Struktur pasar yang dihadapi petani baik dari sisi pemenuhan konsumsi dan produksi maupun dari sisi output yang mereka hasilkan sangat mencekik kehidupan mereka. Penyediaan barang-barang konsumsi dan kebutuhan produksi dikangangi oleh para pemasok



yang mampu mengendalikan harga secara sepihak. Petani berkorban lebih besar daripada yang seharusnya dan selayaknya mereka bayar. Sementara untuk menjual hasil produksi mereka juga dihadapkan pada struktur pasar yang oligopsonis. Hanya ada beberapa pembeli hasil-hasil pertanian dan mereka menentukan harga beli secara sepihak pula dan umumnya sangat rendah.

Belum ada terapi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi mekanisme pasar yang sangat mencekik para petani tersebut. Pemerintah bahkan seolah-olah membiarkan hal itu berlangsung dan bertindak lalai dalam membela petani. Padahal mereka tidak lebih sebagai tameng para pemburu rente mengekalkan hegemoni ekonomi mereka.

Petani juga kian terjepit untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya dengan buruknya kualitas infrastruktur di pedesaan. Biaya produksi dan pemasaran hasilnya menjadi mahal dan kualitas produk sulit ditingkatkan. Jalan-jalan yang buruk memberi kontribusi biaya transportasi yang tinggi dan biaya produksi yang mahal.

Ke depan sangat diperlukan kebijakan yang benar-benar strategis bagi mengungkap benang kusut ini. Perbaikan infrastruktur mutlak diperlukan guna mengurangi ongkos produksi dan mahalannya harga barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan petani. Jalan-jalan ke sentra produksi dan pemukiman penduduk harus diperbaiki sehingga kualitas hasil produksi pertanian dapat terjamin sampai ke pasar. Perbaikan kelembagaan petani harus ditingkatkan pula guna meningkatkan skill dan keterampilan mereka secara berkelompok. Ini akan sangat berguna bagi meningkatkan posisi tawar petani di pasar. Pendapatan petani dapat dinaikkan bila posisi tawar mereka bisa menguat. Keadaan demikian bisa diperoleh bila petani bisa secara berkelompok membangun kekuatan, baik dari aspek organisasi kelembagaan maupun dari aspek kualitas hasil produksi.

Akhirnya, subsidi petani tetap diperlukan. Hanya saja pemberiannya bukan dari sisi produksi tetapi dari sisi hasil produksi. Semakin banyak hasil yang ditelorkan petani semakin besar dukungan subsidi yang



akan diterimanya. Insentif seperti ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani dan kualitas hasil produksi mereka. Semoga...!!!

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Mental produktif dan inovatif tak mungkin tumbuh dengan cara gegabah mengucurkan dana ke desa. Bila serius membangun bangsa memang harus dimulai dari membenahi desa dan mengarahkan masyarakatnya sebagai subjek pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



MEMBANGUN DESA

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kabar menarik menyeruak dari Gubernur Riau terpilih. Setiap desa di Riau akan memperoleh dana pembangunan sebesar 500 juta rupiah untuk pembangunan. Para kepala desa telah dikumpulkan dan diminta untuk mengajukan proposal agar dana tersebut dapat dicairkan. Paling tidak kebijakan ini telah menimbulkan semangat baru bagi kepala desa. Malum mereka merupakan ujung tombak yang berhadapan dengan masyarakat. Segala persoalan yang mengemuka ditengah-tengah masyarakat harus diselesaikan dengan baik. Sementara selama ini sumber-sumber untuk memodali penyelesaian itu sangat terbatas.

Jika dana per desa memang akan dikucurkan maka dana APBD Provinsi Riau yang harus dialokasikan untuk itu akan mencapai Rp920 milyar. Jumlah desa di Riau saat ini 1.599 dan jumlah kelurahan sebanyak 241 buah. Untuk ukuran APBD Riau yang mencapai 8,7 triliun rupiah dana sebesar itu bukanlah sulit untuk direalisasikan. Tujuannya juga cukup mulia karena membangun desa memang merupakan amanat undang-undang. Lantas apakah ada kendala dan tantangan dalam mengimplementasikannya?

Pertama, tentunya menyangkut kewenangan provinsi yang tidak sampai ke ranah itu. Jika tidak ada payung hukum yang memadai maka upaya itu dapat terkendala sampai dibuatnya peraturan gubernur dan ketentuan-ketentuan teknis berkenaan dengan tugas pembantuan provinsi



ke desa. Artinya, masih diperlukan waktu untuk merancang aturan main yang memadai agar niat baik membangun desa tidak menjadi mala petaka di KPK.

Kedua, berkenaan dengan kesiapan desa dan masyarakatnya dalam memanfaatkan dana tersebut. Tidak perlu pesimis sebenarnya dalam masalah ini. Masyarakat desa tentu lebih tau apa yang patut dilakukan untuk perbaikan desanya. Kerawanannya hanya terletak pada eforia semata. Berbagai dana yang mengucur ke desa selama ini lebih banyak mengarah pada hal yang kurang produktif. Pada akhirnya dana tersebut baik menenggelamkan batu ke lubang. Hilang tak berkesan. Bahkan kalau pun dibangun dalam bentuk infrastruktur tidak dikalkulasi terlebih dahulu untung ruginya secara ekonomi.

Ketiga, menyangkut fungsi alokasi di APBD yang telah terkunci oleh beberapa ketentuan yang mengikat. Untuk urusan pendidikan harus mencapai 20 persen dan untuk kesehatan sebesar 5 persen. Selain itu belanja pegawai birokrasi juga tidak mungkin dirasionalisasikan pada hal-hal yang sudah baku. Kecuali mengefisienkan beban-beban yang dapat dianggap bersifat mubazir. Menciutkan gaji dan tunjangan tentunya sangat tidak manusiawi dilakukan. Pemerintah Riau juga harus mendanai berbagai urusan wajib dan urusan pilihan lainnya yang bila tidak tertangani dengan baik dapat mengganggu fungsi distribusi dan stabilisasi yang harus dijalankan pemerintah.

Niat membangun desa memang merupakan hal penting dan masuk dalam amanat undang-undang negara. Kepala desa bertanggungjawab memimpin masyarakat di desanya untuk mencapai perekonomian dalam skala produktif yang dapat memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Undang-undang desa juga telah mengamanatkan adanya alokasi dana dari APBN dalam jumlah yang cukup besar untuk desa. Diperkirakan setiap tahun desa akan memperoleh dana lebih kurang Rp 1,4 milyar rupiah. Belum lagi bila pemerintah provinsi dan kabupaten juga ikut mengucurkan anggarannya ke desa. Berkaitan dengan itu menjadi urgen dan wajib hukumnya mempersiapkan desa menghadapi era baru yang konstruktif



tersebut. Jika tidak maka desa dan masyarakatnya akan tenggelam dalam euforia yang justru kontraproduktif bagi sasaran pengucuran dana ke desa.

Langkah yang perlu diambil adalah menjamin terselenggaranya pemerintahan desa yang tidak saja mampu memakmurkan masyarakat desa tetapi juga membuat desa saling terangkai dalam satu kesatuan wilayah yang lebih tinggi. Prinsip desa maju maka Indonesia maju harus dapat diwujudkan. Disparitas antar desa yang mungkin muncul dari sumber-sumber desa yang berbeda harus dieliminir sedini mungkin sehingga konflik antar desa tidak mengemuka. Desa harus menjadi basis pemberdayaan masyarakat dan ikut terlibat dalam memelihara sumber-sumber ekonomi di desanya. Dana desa jangan sampai dialokasikan untuk mengeksploitasi sumberdaya secara berlebihan. Desa harus mampu memilih proyek-proyek pembangunan yang menumbuhkan inovasi dan kreativitas masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memiliki nilai ekonomi dalam arti menumbuhkan nilai tambah yang berkesinambungan.

Untuk Provinsi Riau kucuran dana desa hendaklah diikuti oleh berbagai program pendukungnya. Pertama, mengidentifikasi desa secara spesifik dan valid. Baik menyangkut sumber-sumber fisik maupun manusianya. Termasuk mengetahui berbagai permasalahan yang ada dan memetakan potensi-potensi yang tersedia untuk dikembangkan.

Kedua, menyusun tata ruang desa sesuai peruntukannya yang dinamis. Hal ini penting mengingat saat ini berbagai kepentingan bisnis juga bergentayangan di desa. Tidak ketinggalan pula kepentingan-kepentingan politik yang dapat mengacaukan sasaran pembangunan masyarakat desa yang hakiki. Adanya tata ruang desa akan mengekang eksploitasi desa secara berlebihan dan membentuk jaringan keterkaitan antar desa. Pemerintah provinsi dan kabupaten sangat berkepentingan dalam persoalan ini mengingat izin-izin lokasi dan investasi harus diselaraskan dengan perkembangan masyarakat desa.

Ketiga, grand-design pembangunan desa mesti disusun untuk memastikan dana yang dikucurkan digunakan secara terencana. Pemerintah harus memberi ruang pada pemerintahan desa untuk mengembangkan



diri secara partisipatif. Namun, jangan sampai terjadi dinamika yang tak searah dengan pembangunan bangsa secara integratif. Otonomi desa jangan membuat desa menjadi saling eksklusif sama lain. Harus terbina hubungan keterkaitan antar desa dan bangun strukturnya secara vertikal.

Kempat, berkenaan dengan sumberdaya manusia yang masih terbatas, pemerintahan desa harus senantiasa dilakukan pemberdayaannya. Tidak gampang menyusun perencanaan pembangunan yang produktif. Dibutuhkan kemampuan memetakan keadaan dan menarik resultannya untuk memfokuskan strategi dan program pembangunan yang optimal. Bila tidak maka akan terjerembab ke dalam pameo “kesalahan perencanaan sama halnya dengan merencanakan kesalahan”. Pemerintah provinsi dan kabupaten/justru seharusnya masuk pada masalah-masalah pemberdayaan ini. Jika undang-undang tentang desa telah diimplementasikan maka sumber keuangan membangun secara mandiri oleh desa tersedia cukup banyak. Aspek pemberdayaan dan peningkatan skill dan keterampilan pengelola desa menjadi mendesak untuk senantiasa dikembangkan.

Masyarakat desa menunggu sentuhan yang optimal dari pemerintah. Terjebak dalam eforia justru malah membuat arang habis besi binasa. Tanpa pemberdayaan masyarakat desa tetap saja akan menjadi ranah politik yang memilukan. Memanjakan mereka dengan berbagai bantuan tak mendidik malah akan kian menjerumuskannya pada kungkungan keterbelakangan. Mental produktif dan inovatif tak mungkin tumbuh dengan cara gegabah mengucurkan dana ke desa. Bila serius membangun bangsa memang harus dimulai dari membenahi desa dan mengarahkan masyarakatnya sebagai subjek pembangunan. Bukannya sebagai objek politisasi semata. Semoga !

**
**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Penting pula dilakukan penerapan pendidikan

kewirausahaan, baik formal maupun non formal. Sumber daya alam dan lahan di Riau masih memungkinkan untuk dikelola secara profesional diluar minyak bumi, batubara, sawit dan karet.



DAKYAT PEDESAAN RIAU KIAN MISKIN

Berita resmi yang dilansir BPS Riau tanggal 2 Januari 2014 membuat perasaan kian terenyuh. Terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Riau. Sampai September 2013 ada 522.530 jiwa penduduk miskin Riau atau 8,42 persen dari total penduduk. Bertambah sebanyak 41.220 jiwa dibandingkan tahun 2012. Kenyataan ini sungguh pahit, mengingat besarnya anggaran belanja dan pendapatan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Riau. Adakah limpahan APBD yang kian membesar tersebut terkait kelindan dengan perbaikan kualitas hidup rakyat Riau? Masihkah kita dengan penuh yakin bahwa yang dikerjakan dan diperbuat selama ini, khususnya sejak otonomi daerah diimplementasikan, membawa kebaikan bagi masyarakat?

Ditilik lebih jauh data BPS tersebut ternyata pertambahan jumlah penduduk miskin yang terbanyak terjadi di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan Riau mencapai 359.820 jiwa atau 9,55 persen dari total penduduk. Bertambah sebanyak 34.920 jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ternyata, masyarakat Riau di pedesaan semakin terjepit dan kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya untuk dapat dikatakan hidup layak. Semakin besar jumlah masyarakat yang tak mampu memperoleh pendapatan dan kalau pun ada perbaikan pendapatan tidak sebanding dengan beban hidup yang meski ditanggungnya.

Setorang dikategorikan miskin menurut BPS berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).



Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Artinya, seseorang dapat dikategorikan miskin bila pengeluarannya tidak mencapai titik garis kemiskinan tertentu. Untuk tahun 2013 Garis Kemiskinan Riau berada pada posisi pengeluaran Rp 350.129,- per kepala per bulan. Komponennya terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 258.100,- dan komponen Makanan Rp 92.029,-. Peranan komponen makanan dalam Garis Kemiskinan tersebut mencapai 73,72 persen.

Berdasarkan kriteria tersebut ternyata semakin banyak budak Riau di pedesaan yang tak cukup makan. Artinya, sampai dengan September 2013 penduduk Riau yang tak mampu berbelanja sebesar Rp 350.129,- per bulan adalah sebanyak 522.530 orang. Mengacu pada struktur penduduk Riau dari hasil sensus 2010 maka jumlah penduduk pada usia 0 sampai dengan 4 tahun mencapai 40,72 persen sehingga dapat disimpulkan budak-budak di pedesaan Riau yang tak cukup makan mencapai 144.900 orang. Pertambahannya pada tahun 2013 ini mencapai 8,6 persen. Ini adalah generasi mendatang Riau dan dengan jumlah yang demikian besar tidak mampu mengakses makanan yang cukup dan bergizi maka persoalan pengembangan sumberdaya manusia di Riau bukan hal yang dapat dianggap main-main lagi atau disepelekan begitu saja dengan strategi-strategi pembangunan yang serampangan. Pendekatan untuk penanganannya harus terukur dengan baik dan komprehensif. Semua kepala pemerintahan, baik di provinsi dan kabupaten harus menyusun kebijakan secara bersama untuk menemukan solusi yang optimal, partisipatif dan dengan berbasiskan hasil riset yang valid.

Selain dihadapkan pada jumlah penduduk miskin dengan usia muda yang cukup tinggi dari aspek pendidikannya pun penduduk Riau juga berada dalam posisi yang memprihatinkan. Data Riau Dalam Angka tahun 2012 menunjukkan 50,31 persen penduduk umur 10 tahun ke atas di Riau yang hanya berpendidikan sekolah dasar (SD). Bahkan 19,72 persen diantaranya tidak lulus SD dan 2,39 persen tidak pernah sekolah



sama seperti. Mereka sebagian besar (44,8 persen) bekerja pada lapangan usaha pertanian. Artinya, Riau pada dasarnya sedang dihadapkan pada persoalan besar dalam hal sumberdaya manusia yang justru merupakan sumberdaya yang harus menjadi andalan daerah ini untuk memenangkan persaingan di masa mendatang.

Upaya memperbaiki kualitas sumberdaya manusia Riau nampaknya harus dimulai dari dua sisi yang saling berkait. *Pertama*, besarnya jumlah mereka yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar ke bawah tentu tidak bisa diterapi dengan program pendidikan sekolah. Penanganannya haruslah dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan keterampilan praktis yang dibutuhkan dunia kerja. Pemikirannya adalah bagaimana generasi muda dengan pendidikan formal yang rendah dapat dilatih memiliki keterampilan kerja pada bidang yang diminati dan bakatnya. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus mendata mereka untuk mengelompokkan sesuai minat dan bakatnya dan dengan memberdayakan semua Balai Pelatihan Kerja Daerah yang dimiliki memberikan program keterampilan teknis sesuai pasar kerja yang dinamis. Investasi di BLK ini harus terencana dengan baik dan disadari sepenuhnya sebagai institusi yang vital bagi perbaikan kualitas dan daya saing Riau ke depan.

Pada sisi pendidikan formal pemerintah di Riau harus berbagi peran. Untuk pendidikan SLTA ke bawah pemerintah provinsi sebaiknya tidak ikut menggarap dalam hal fisik dan infrastruktur. Bangunan sekolah cukup dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi hanya menanganai aspek pemberdayaan dan peningkatan kualitas. Program dan kegiatan oleh provinsi harus lebih diarahkan pada peningkatan mutu belajar mengajar. Menulis di batu tulis pun seorang siswa akan menjadi pintar asal substansi pembelajarannya mengena dan memadai. Perbaikan kualitas guru dan ketegasan dalam memaksa mereka untuk menjadi guru yang dapat digugu dan ditiru mutlak dilakukan. Strategi peningkatan kesejahteraan guru harus disejajarkan dengan peningkatan kinerja dan optimalisasi mereka mengubah kualitas anak didik. Membebani guru dengan berbagai kewajiban diluar bidang mereka untuk mendapatkan



dana seraya dikasi misalnya hanyalah akan mengacaukan konsentrasi mereka dalam mencari cara memperbaiki kualitas pengetahuan dan budi pekerti anak didik.

Ini berarti dana 20 persen dalam APBD yang dialokasikan untuk pendidikan harus benar-benar dikelola secara optimal dan strategis. Bukan sekedar membelanjakannya dalam bentuk proyek-proyek yang mubajir dan berbau politis. Riau perlu kebijakan dan program yang terencana dan terlaksana dengan baik dalam hal perbaikan kualitas SDM bukannya kegiatan kegiatan *charity* mengakibatkan lemahnya kreativitas dan inovasi. Hindari politisasi pendidikan melalui bantuan seragam dan sepatu sekolah. Perpustakaan dan laboratoriumnya jauh lebih penting dari itu meskipun mereka hanya pakai baju oblong pada saat membaca buku-buku yang berkualitas dan terbaru.

Pening pula dilakukan penerapan pendidikan kewirausahaan, baik formal maupun non formal. Sumberdaya alam dan lahan di Riau masih memungkinkan untuk dikelola secara profesional diluar minyak bumi, batubara, sawit dan karet. Hanya dengan mengelola kelopak batang pisang sebagai kerajinan rumah tangga menjadi peluang yang besar bagi Riau menjadi sentra komoditas ekspor non migas. Sumber bahan bakunya tersedia dan melimpah. Pemanfaatan lahan kosong untuk produksi pertanian tanaman pangan berkualitas secara ekonomi lebih menjanjikan bagi pemuda-pemuda Riau menjadi kaya. Pemerintah harus mendorong kelompok-kelompok pemuda pedesaan menjadi petani profesional dengan kontribusi margin yang tinggi.

Khusus bagi anak-anak usia balita dan usia sekolah dasar, program perbaikan gizi dan kesehatan adalah tulang punggung dalam menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Untuk itulah undang-undang mengamatkan agar anggaran negara atau daerah 5 persen diantaranya harus dialokasikan secara optimal bagi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Anggaran tersebut sebagian besar diarahkan bagi tindakan preventif dalam bidang kesehatan dan sisanya baru untuk upaya-upaya kuratif. Menjaga kesehatan tentunya jauh lebih baik dan menguntungkan



ketimbangan mengobati sakit untuk sehat. Yang pasti, jangan biarkan budak pedesaan Riau tak cukup makan dan terabaikan kesehatannya. Riau ke depan hanya bisa eksis dari sumberdaya manusia yang berkualitas dan dapat diandalkan. Semoga...!

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tidak banyak angkatan kerja yang bekerja di sektor industri sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan berbagai industri kehutanan yang ada di Riau tidak memiliki kontribusi yang besar bagi serapan angkatan kerja.



UNTUNG RUGI INDUSTRI KEHUTANAN DI RIAU

Salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang dieksploitasi di Riau adalah hutan dan hasil-hasilnya. Sebagai daerah yang memiliki kawasan hutan yang besar wilayah ini telah menjadi tempat yang sangat menggiurkan bagi industri perkayuan. Dalam satu provinsi ada dua pabrik pengolahan kayu yang menghasilkan kertas dan bubur kertas di Riau yang bahan bakunya diperoleh dari hutan alam dan hutan tanaman industri yang dikelolanya. Komoditas bubur kertas menjadi andalan ekspor Riau dan keberadaan perusahaan tersebut menunjang pula dinamika ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja. Persoalannya sekarang adalah seberapa jauh sebenarnya untung rugi bisnis kehutanan ini, khususnya dikaitkan dengan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat ?

Selama ini perekonomian Riau tumbuh sangat pesat dan senantiasa berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada Triwulan I tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Riau tanpa Migas sebesar 6,6 % sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 4,9 %. Pada Triwulan keempat ekonomi Riau masih tumbuh 6 % sedangkan nasional 5,9 %.

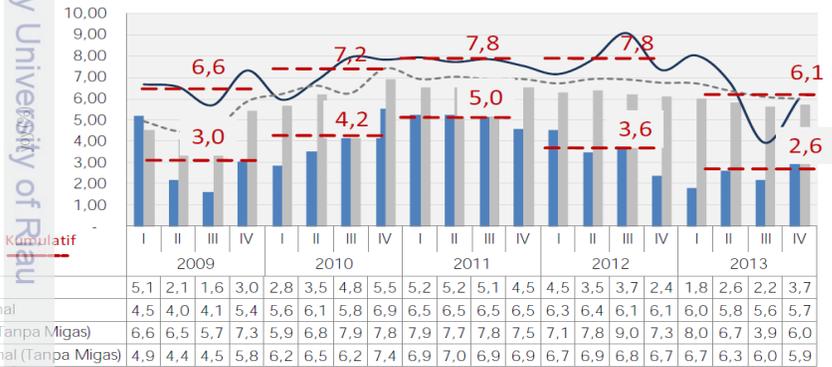
Bila diamati dari aspek penggunaan maka pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Peran ekspor relatif kecil dan semakin menurun. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekspor mencapai 8,69 %, sedangkan tahun 2013 hanya tumbuh 1,82 %. Perannya juga semakin

Hak Cipta Milindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau dan Nasional (yoy, %)



kecil yakni sebesar 3,85 % pada tahun 2012, sedangkan tahun 2013 hanya 0,81 %. Keadaan ini menggambarkan semakin rendahnya peran ekspor dalam perekonomian Riau. Justru peranan konsumsi rumah tangga yang mengalami peningkatan, yakni dari 5,61 % tahun 2012 naik menjadi 5,86 % tahun 2013. Dalam artian ini perekonomian Riau lebih mengedepankan kekuatan konsumsi masyarakat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Peran investasi dan ekspor justru lebih rendah.

Tabel 2
Perkembangan Ekonomi Riau Tanpa Migas Menurut Penggunaan Tahun 2012-2013

Komponen	2012***	2013 (r)		2013	Sumbangan (%)			
		III***	IV***		2012	III-13	IV-13	2013
1. Konsumsi	6.65	6.63	7.36	7.03	5.61	5.41	6.16	5.86
2. Investasi	6.30	3.17	5.51	6.98	1.94	0.99	1.68	2.11
3. Ekspor	8.69	0.02	2.44	1.82	3.85	0.01	1.05	0.81
4. Impor	5.95	4.37	5.01	4.56	3.53	2.48	2.88	2.66
Total Non Migas	7.86	3.93	6.01	6.13	7.86	3.93	6.01	6.13

Sumber: KER BPS WIV 2013.



Bila diamati struktur ekspor Riau maka yang mendominasi adalah komoditas-komoditas yang bersentuhan dengan hutan, baik dari hasil pengolahan kayu maupun dari hasil perkebunan yang pada dasarnya menggunakan lahan yang semulanya merupakan hutan.

Tabel 3
Struktur Ekspor Riau Non Migas Menurut Komoditas

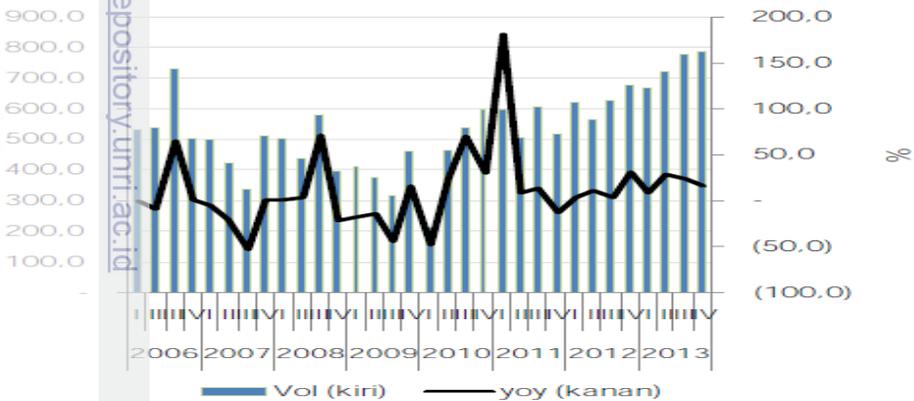
Jenis	Sumber	2013				Pangsa (%)		yoy (%)	
		I	II	III	IV	III-13	IV-13	III-13	IV-13
Hewan Berkulit	419.68	338.40	388.46	454.68	8.60	8.67	35.54	11.64	
Minuman	6.02	7.22	4.57	6.64	0.10	0.13	38.03	27.37	
Mineral dan Pelumas	690.15	762.50	846.27	861.70	18.74	16.42	28.95	17.20	
Lemak Nabati	467.36	463.70	316.73	362.14	7.01	6.90	(33.22)	(27.76)	
Manufaktur	2568.62	2375.58	2246.22	2779.74	49.74	52.98	(14.46)	2.16	
Peralatan	318.75	235.53	335.32	372.82	7.43	7.11	10.14	48.43	
Manufaktur	367.56	371.51	378.30	408.87	8.38	7.79	(2.54)	11.13	
Peralatan	0.02	0.00	0.00	0.02	-	0.00	(100.00)	913.93	
Manufaktur	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	-	0.00	(100.00)	
mata uang	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	
Total	4.838.19	4.554.44	4.515.89	5.246.62	100		(4.71)	5.16	

Pada tahun 2013 pangsa ekspor lemak dan minyak nabati mencapai 52,98 % dengan pertumbuhan mencapai 2,16 %. Sedangkan ekspor Barang mentah dengan pangsa mencapai 16,42 % mampu tumbuh sebesar 17,20 %. Barang manufaktur dengan pangsa sebesar 7,79 % mengalami pertumbuhan sebesar 11,13 %. Sementara itu perkembangan ekspor *pulp and paper* mengalami penurunan sehingga perannya terhadap perekonomian juga akan berkurang. Booming ekspor komoditas ini hanya terjadi ketika akhir 2010 dan memasuki 2011. Setelah itu mengalami penurunan dan berfluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia.

Menurunnya ekspor hasil olahan kayu dan kurang membaiknya perekonomian di sektor ini menyebabkan geliat di sektor lain juga menurun. Perekonomian Riau banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga karena masyarakat yang bekerja di sektor pertanian cukup tinggi dan pendapatan yang diperoleh dari hasil kebun akan dikonsumsi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dorongan konsumsi ini akan menggerakkan



Grafik 1. Perkembangan Ekspor Pulp and Paper Riau



Sumber: KER RI TW IV 2013

sektor perdagangan, hotel dan restoran. Semakin membaik harga TBS maka semakin tinggi pendapatan masyarakat dan semakin besar pula konsumsi mereka.

Untuk industri perikanan dan HTI pendapatannya cenderung bersifat tetap karena mereka bekerja sebagai buruh dan pegawai tetap. Perkembangan ekonomi yang berkaitan dengan komoditas ekspor hasil pengolahan kayu tidak memberi kontribusi pada naik turunnya konsumsi masyarakat yang bekerja di sektor tersebut. Perusahaan-perusahaan kayu hanya melakukan rasionalisasi tenaga kerja bila tekanan penjualan mencapai pada level yang membahayakan perusahaan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Perdagangan yang ditopang oleh pertanian dan industri pengolahan hasil hutan ternyata tidak begitu banyak berpengaruh terhadap terbukanya lapangan kerja. Ternyata tingkat pengangguran terbuka di Riau semakin meningkat dan mereka sebagian besar berada di pedesaan.



Tabel 4 Tingkat Pengangguran di Riau

Kegiatan Utama	2012	2013	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
penduduk usia 15 Tahun ke Atas (jiwa)	3.985.257	4.127.474	142.217
Angkatan Kerja (jiwa)	2.506.776	2.625.848	119.072
Bekerja	2.399.002	2.481.361	82.359
Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka)	107.774	144.487	36.713
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	1.478.481	1.501.626	23.145
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	62,9	63,62	0,72
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	4,3	5,50	1,20

Sumber: BPS Riau, 2013

Pada tahun 2012 angkatan kerja Riau sebanyak 2.506.776 orang dan yang bekerja hanya sebanyak 2.399.022 orang sehingga tingkat pengangguran terbuka mencapai 107.774 orang atau 4,3%. Pada tahun 2013 kondisinya kian memburuk dimana dari 2.625.848 orang yang mampu bekerja hanya sebanyak 2.481.361 orang sehingga pengangguran terbuka naik menjadi sebanyak 144.487 orang atau 5,50 %.

Tidak banyak angkatan kerja yang bekerja di sektor industri sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan berbagai industri kehutanan yang ada di Riau tidak memiliki kontribusi yang besar bagi serapan angkatan kerja. Industri hanya memberikan kontribusi sebesar 6,51 % dimana di pedesaan hanya sebesar 4,62 % dan di perkotaan sebesar 6,62 %. Kedua industri kayu di Riau berada di wilayah pedesaan yakni di kabupaten Pelalawan dan Siak.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Tabel 5
Perkembangan Penduduk Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Riau

Lapangan Pekerjaan Utama	Perkotaan	Pedesaan	Kota + Desa
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	10,19	65,08	44,26
Manufaktur dan Penggalian	2,02	1,63	1,78
Perdagangan	9,62	4,62	6,51
Industri Gas dan Air Minum	0,22	0,30	0,27
Elektrik, Gas, Air Panas dan Sirkulasi	9,54	3,01	5,49
Perumahan, Rumah Makan dan Jasa	33,27	11,69	19,88
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5,96	2,30	3,69
Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	4,98	1,22	2,64
Jumlah Masyarakat, Sosial dan Perorangan	24,21	10,15	15,48
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Riau, 2013

Sialan dengan meningkatnya angka pengangguran maka penduduk miskin Riau juga bertambah. Pada posisi September 2012 jumlah penduduk miskin sebanyak 481.310 orang atau 8,05 % sedangkan September 2013 naik menjadi 522.530 orang atau 8,42 %. Penduduk miskin meningkat akibat jumlah penduduk yang kian bertambah di Riau dan pertambahan penduduk tersebut banyak disumbangkan oleh migrasi. Penduduk yang datang ke Riau pada umumnya masuk ke desa-desa untuk bekerja sebagai petani sawit dan pabrik-pabrik pengolahan kayu. Ini berarti keberadaan industri tersebut telah turut pula memberi dampak pada naiknya angka pengangguran. dan menambah jumlah masyarakat miskin di Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Tabel 6
Penduduk Miskin Riau

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Desember 2012	156,41	324,90	481,31	6,68	8,94	8,05
Desember 2013	162,71	359,82	522,53	6,68	9,55	8,42

Sumber: BPS, Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berpijak dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa keuntungan dan keburukan dari pengelolaan hutan di Riau:

Industri perkebunan dan CPO memberi lapangan pekerjaan pada sebagian penduduk namun mereka pada dasarnya datang dari berbagai penjuru yang telah menimbulkan migrasi ke Riau. Jumlah penduduk bertambah sementara lapangan pekerjaan lebih kecil perkembangannya.

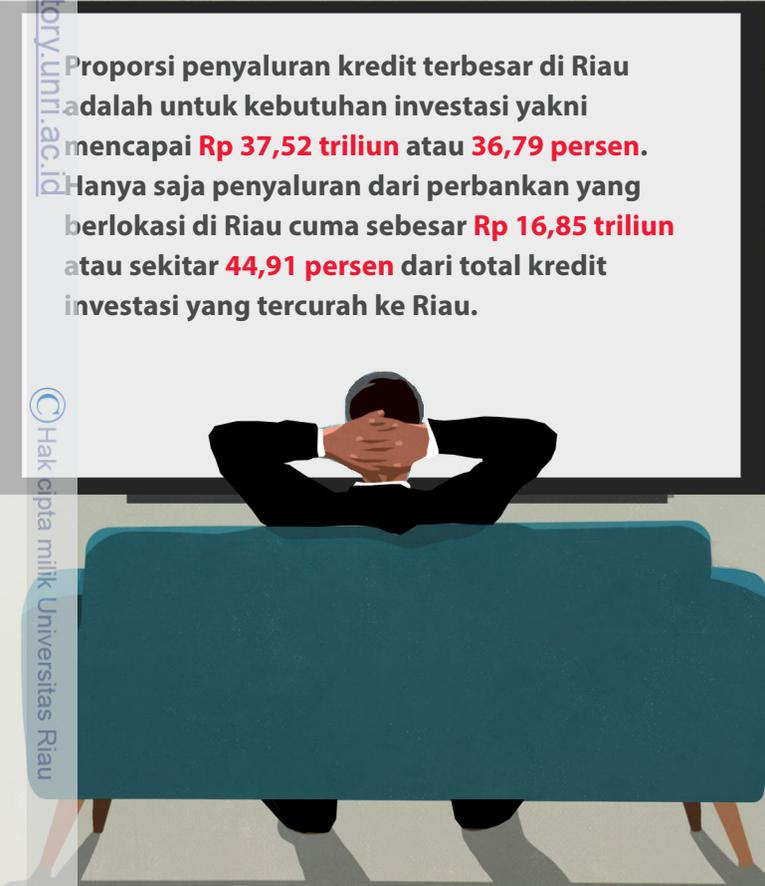
Industri perkebunan dan CPO menopang ekspor Riau dan pada industri CPO perkembangan pasar internasional sangat berpengaruh pada naiknya turunya pendapatan masyarakat. Penurunan harga dan permintaannya akan menyebabkan turunya harga TBS dan daya beli masyarakat juga turun. Mengingat sebagian besar perekonomian Riau ditopang oleh industri rumah tangga maka gangguan harga TBS langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan hutan untuk tujuan industri dan perkebunan juga menimbulkan dampak-dampak lingkungan yang besar dan gangguan pada kesehatan masyarakat. Masalah ini juga berdampak pada naiknya pengeluaran penduduk sehingga terjadinya peningkatan pendapatan langsung digerogeti oleh besarnya pengeluaran. Ini berarti kesejahteraan rakyat tidak dapat ditingkatkan. Keadaan ini semakin parah akibat tingginya angka inflasi di pedesaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Proporsi penyaluran kredit terbesar di Riau adalah untuk kebutuhan investasi yakni mencapai **Rp 37,52 triliun** atau **36,79 persen**. Hanya saja penyaluran dari perbankan yang berlokasi di Riau cuma sebesar **Rp 16,85 triliun** atau sekitar **44,91 persen** dari total kredit investasi yang tercurah ke Riau.



LEKSPANSI KREDIT PERBANKAN DI RIAU

Perekonomian suatu wilayah tentunya tidak hanya didorong oleh pemerintah saja. Agar perekonomian tumbuh dan bergerak semakin membaik peran dari berbagai institusi sangat menentukan. Salah satu diantaranya adalah perbankan. Bank sebagai lembaga intermediasi berperan dalam menghubungkan antara pemegang kelebihan likuiditas dengan orang atau lembaga yang membutuhkan likuiditas. Seseorang ataupun institusi yang memiliki kelebihan uang akan menempatkannya di bank, baik dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Bank memberikan jasa dalam bentuk bunga (*interest*). Selanjutnya bank akan mendistribusikan likuiditas atau uang yang telah dikumpulkannya dari para deposan dalam bentuk pinjaman kepada siapa saja yang membutuhkannya dan mengenakan bunga juga yang akan menjadi pendapatan bagi bank tersebut. Semakin lancar perputaran uang dari yang berkelebihan kepada yang membutuhkan melalui bank maka perekonomian menjadi berjalan semakin dinamis. Oleh karena itu kredit yang diberikan bank kepada para pengusaha dan rumah tangga akan mendorong pertumbuhan investasi maupun konsumsi masyarakat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Di Indonesia peran kredit perbankan dalam perekonomiannya ternyata masih sangat kecil. Kredit perbankan belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari perbandingan atau rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dewasa ini rasionya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



baru pada kisaran 31 persen. Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 115 persen, Vietnam 111,6 persen, dan Thailand sebesar 31,9 persen. Artinya peran perbankan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk menjamin terselenggaranya perekonomian yang lebih efisien dan produktif.

Riau sendiri peranannya lebih tinggi dari Indonesia yakni sebesar 35,27 persen. Apalagi jika dimasukkan alokasi kredit dari perbankan yang ada di luar Riau namun dimanfaatkan di Riau rasionya menjadi lebih tinggi yakni 53,69 persen. Total kredit berdasarkan lokasi bank di Riau sampai Triwulan II Tahun 2019 mencapai Rp 66,991 triliun sedangkan menurut lokasi proyek sebesar Rp 101,996 triliun. Artinya terdapat kredit sebesar Rp 35,01 triliun atau 32,36 persen yang dananya berasal dari luar Riau. Baik untuk investasi, modal kerja maupun untuk kepentingan konsumsi. Rerata pertumbuhan kredit di Riau mencapai 7,5 persen.

Proporsi penyaluran kredit terbesar di Riau adalah untuk kebutuhan investasi yakni mencapai Rp 37,52 triliun atau 36,79 persen. Hanya saja penyaluran dari perbankan yang berlokasi di Riau cuma sebesar Rp 16,85 triliun atau sekitar 44,91 persen dari total kredit investasi yang tercurah ke Riau. Artinya, perbankan yang beroperasi di Riau belum begitu optimal mendorong kebutuhan pendanaan investasi yang berkembang di Riau. Proporsinya pun relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi kredit untuk modal kerja dan untuk konsumsi. Bank yang beroperasi di Riau lebih banyak mengalokasikan kredit untuk kepentingan konsumsi yakni sebesar Rp 29,34 triliun atau 43,8 persen dari total kredit yang diluncurkannya ke Riau.

Kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai Rp 24,53 triliun dengan pertumbuhan lebih tinggi dari pertumbuhan total kredit yakni sebesar 8,76 persen. Proporsi kredit UMKM dalam struktur kredit perbankan di Riau mencapai 36,62 persen. Alokasi kredit UMKM tertinggi adalah untuk usaha kecil yang mencapai Rp 9,63 triliun atau 36,26 persen. Sedangkan untuk usaha mikro sebesar Rp 7,92 triliun dan



usaha menengah sebesar Rp 6,99 triliun. Bank Perkreditan rakyat juga telah memainkan peranan yang cukup signifikan. Meskipun porsi kredit yang disalurkan masih relatif kecil yang baru sebesar Rp 1,01 triliun namun pertumbuhannya lebih tinggi dari pertumbuhan total kredit yakni sebesar 804 persen.

Permasalahan kredit perbankan di Riau nampaknya bukan dalam aspek ekspansi semata. Jika didekati dari ukuran *Loan to Deposit Ratio (LDR)* kadar ekspansi kredit di Riau baru mencapai 85,23 persen. Masih terdapat ruang untuk memperbesar porsi itu. Jalannya bisa melalui upaya meningkatkan pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau cukup dengan memperluas jangkauan penyaluran produk-produk perbankan kepada masyarakat. Indonesia memang masih sangat rendah literasi dan akurasi keuangannya. Sekitar 50 juta orang yang berpenghasilan dibawah dua dolar per hari belum memiliki akses sama sekali ke perbankan. Meskipun saat ini pendapatan mereka sangat kecil namun melalui sentuhan produk-produk perbankan akan muncul daya ungkit tertentu dalam perekonomian rumah tangganya. Lebih memprihatinkan lagi bahwa masih terdapat sekitar 60 juta pengusaha jenis mikro, kecil, dan menengah belum tersentuh jasa layanan perbankan.

Kinerja bank di suatu wilayah maupun negara dapat dinyatakan baik bila mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menjaga kualitas pertumbuhan tersebut melalui pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum perbankan bersama semua *stakeholder* perekonomian, guna menjaga ketahanan ekonomi bangsa, hendaknya secara konsisten mampu memelihara daya beli masyarakat tetap kuat. Pada gilirannya kekuatan daya beli ini akan mempertahankan pula kontinuitas produksi nasional. Selain itu, pengendalian inflasi yang stabil dan tidak terlalu tinggi harus dilakukan agar perekonomian tidak memanas pada tataran moneter. Pada sisi lain, pemerintah khususnya, harus menciptakan kebijakan yang mampu mendorong investasi. Bukan malah menjejali investor dengan berbagai gaya dan kebijakan yang mendistorsi pertumbuhan investasi itu sendiri.



Di Riau sendiri pendalaman industri perlu dilakukan secara terencana dengan baik melalui pengembangan kawasan-kawasan industri yang sudah ada selama ini. Sumber-sumber bahan baku yang baru mampu memasarkan dalam bentuk barang mentah dan barang setengah jadi dapat diolah ke hilirnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Permasalahannya membuka peluang kerja baru guna menyerap angkatan kerja yang tumbuh dengan cepat. Usaha-usaha menengah dibina untuk menjadi mitra usaha mikro dan kecil dengan memberi peluang kepada mereka dalam mengolah sumber-sumber ekonomi pedesaan yang lekat dengan kehidupan ekonomi rakyat. Industri hilir sabut kelapa misalnya, dapat dikembangkan lebih dalam untuk menjadi produk-produk yang sangat *marketable* dan memiliki peluang pasar yang besar. Baik untuk pasaran di dalam negeri maupun untuk ekspor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) perlu lebih meningkatkan sinergi nya dan dengan institusi-institusi terkait lainnya, baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Memperluas jangkauan pelayanan perbankan masih menjadi tugas yang amat strategis mengingat masih minimnya cakupan pelayanan tersebut. Perlu untuk mendorong perbankan yang beroperasi di Riau menciptakan inovasi-inovasi pelayanan terutama sekali layanan bagi rakyat miskin. Memang secara unit produk, bagi perbankan keuntungannya relatif kecil, tetapi dalam jumlah layanan yang besar, keuntungan tersebut akan menjadi besar pula. Bahkan daya tahan bank dapat meningkat karena diversifikasi pasar dan produk layanan yang makin luas dan beragam.

Kebati-hatian dalam ekspansi kredit memang harus tetap dijaga. Bank yang beroperasi untuk memberikan pelayanan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di Riau relatif lebih tinggi risikonya. Kualitas aktiva untuk produk-produk yang diluncurkan ke UMKM dan oleh BPR jauh lebih rendah. *Non Performing Loan (NPL)* atau kredit bermasalah dari kredit yang disalurkan oleh BPR sudah mencapai 13,3 persen. Sedangkan kredit UMKM sebesar 4,74 persen. Walaupun secara keseluruhan *NPL* kredit



perbankan di Riau masih rendah yakni sebesar 2,99 persen. Kenyataan ini memotivasi uluran tangan pemerintah daerah melalui kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong masyarakat bawah lebih dapat dipercaya lagi terhadap produk-produk perbankan yang dinikmatinya.

Selain itu harus ditumbuhkan kelompok-kelompok masyarakat produktif yang dapat dipertautkan dengan dunia perbankan. Literasi keuangan ditingkatkan guna mencapai tingkat perilaku keuangan (*banking habit*) yang semakin efisien. Masyarakat yang memiliki usaha berkelompok dan *melaku* perbankan akan menjadi peluang pasar yang *seksi* bagi produk-produk perbankan. Pada gilirannya akan tercipta sinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketahanan ekonomi wilayah pun akan lebih kuat. Budaya tanggung-renteng yang tercipta di masyarakat akan membuat usaha ekonomi rakyat lebih mampu menangkal cabaran dan penetrasi global. Di Riau produk-produk perbankan untuk usaha kecil dan mikro dapat diarahkan pada produktivitas rakyat yang mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga dan mampu mensubstitusi kebutuhan-kebutuhan yang selama ini didatangkan dari luar daerah dan sangat rentan memicu inflasi serta *memelihara* kemiskinan. *Ontah lab...!!!*

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Bank Perkreditan Rakyat



Ke depan bisnis keuangan di Riau diperkirakan akan makin kompetitif. Beragam produk yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan, khususnya untuk menghimpun dana masyarakat. Lembaga keuangan non bank, seperti asuransi juga sudah mempertajam strategi bisnisnya sehingga makin gencar menembus pasar dan menawarkan substitusi bisnis perbankan.



PRIAU KIAN SEKSI ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Meluasuki akhir 2010 geliat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Riau kian bergemuruh. Walaupun porsinya dalam kancah bisnis perbankan Riau masih kecil tetapi performanya makin cantik. Berdasarkan data Bank Indonesia Pekanbaru pada triwulan ketiga 2009 total asset BPR baru sebesar Rp 613,877 milyar sedangkan pada triwulan ketiga 2010 sudah naik menjadi Rp 721,204 miliar rupiah. Dibanding dengan total asset perbankan secara umum porsinya makin naik dari 1,54 persen menjadi 1,62 persen. Artinya, keberadaan BPR dalam struktur bisnis keuangan di Riau kian memberi warna yang signifikan.

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun meningkat pula dari Rp 412,227 milyar pada triwulan ketiga 2009 naik menjadi Rp 503,967 milyar pada triwulan ketiga 2010 atau meningkat 22,33 persen. Padahal pada periode yang sama peningkatan DPK bank umum hanya sebesar 12,01 persen. Ini menunjukkan BPR makin “seksi” dimata penabung, khususnya kelas menengah kebawah. Porsi DPK yang berhasil dihimpun juga naik dari 1,29 persen menjadi 1,41 persen dibandingkan DPK bank umum.

Bila diamati dari aspek dinamika usaha dalam mendukung ekonomi riil di Riau progresnya kian tampak. Kredit yang dikucurkan BPR pada triwulan ketiga tahun 2010 mencapai Rp 495,765 miliar. Meskipun porsinya baru sebesar 1,77 persen jika dibandingkan dengan total kredit



bank umum, namun pertumbuhannya mencapai 28,53 persen. Padahal pertumbuhan kredit bank umum hanya 18,77 persen. Dibandingkan terhadap total kredit mikro (besaran Rp 50 juta ke bawah) peran BPR juga meningkat signifikan dari 8,3 persen naik menjadi 9,01 persen. Pada triwulan ketiga 2010 total kredit mikro yang dikucurkan perbankan di Riau sudah mencapai Rp 5.501,038 milyar.

Dalam aspek kredit ini BPR lebih ekspansif. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* BPR mencapai 98,37 persen pada triwulan ketiga tahun 2010. Lebih tinggi jika dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 95,06 persen. Ini membuktikan BPR lebih “genit” dalam mendorong perekonomian riil di daerah ketimbang bank umum. LDR bank umum hanya 77,23 persen. Sejalan dengan meningkatnya LDR maka risiko yang diembanya juga naik. *Non Performing Loans (NPLs)* BPR meningkat dari 8,86 persen menjadi 9,38 persen tahun 2010 atau naik 5,87 persen. Hanya saja peningkatan NPLs bank umum lebih tinggi yakni 13,46 % walaupun nilai NPLs nya lebih rendah yang hanya 3,12 persen. Kondisi ini memberikan sinyal pada BPR untuk kian berhati-hati menyentuh *core business* agar tidak terperangkap dalam kredit macet yang kian besar dan berimbas pada turunnya pendapatan.

Secara umum dalam bisnis perbankan di Riau pada periode 2009-2010 terjadi penurunan margin yang diterima. Jika terjadi kredit macet keadaan ini akan memperparah penurunan pendapatan. Menurut Bank Indonesia suku bunga kredit tertimbang bank umum mengalami penurunan dari 13,91 persen menjadi 13,62 persen. Sedangkan suku bunga deposito tertimbang naik dari 6,79 persen menjadi 6,95 persen sehingga margin yang diterima bank umum merosot dari 7,12 persen menjadi 6,67 persen. Dana yang dihimpun kian mahal sehingga *cost of fund* meningkat.

Tanpa pengelolaan kredit yang memadai ekspansi usaha perbankan akan semakin berisiko. Bagi BPR persoalan ini mungkin tidak begitu signifikan mengganggu dinamika usahanya. BPR harus mampu menempatkan dana pada sektor-sektor produktif rakyat dan membentuk



spread DRK. Dalam menghimpun dana BPR memberikan bunga yang lebih rendah dari bunga yang ditetapkan bank umum. Nasabah tidak akan lari jika selebihnya tak terlalu jauh karena karakteristik nasabah BPR sangat spesifik dan terkonsentrasi pada kelas menengah kebawah. Kebijakan ini akan memberi peluang kelebihan dana yang belum dialokasikan untuk kredit dapat ditempatkan dalam deposito di bank umum dengan tetap mempertahankan rasio LDR yang optimal.

Ke depan bisnis keuangan di Riau diperkirakan akan makin kompetitif. Beragam produk yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan, khususnya untuk menghimpun dana masyarakat. Lembaga keuangan non bank, seperti asuransi juga sudah mempertajam strategi bisnisnya sehingga makin gencar menembus pasar dan menawarkan substitusi bisnis perbankan. Produk mereka mirip tabungan berkala. Disatu sisi perbankan juga memodifikasi fitur-fitur produknya. Ada tabungan yang serta-merta memberikan proteksi nasabah atau tabungan berasuransi.

Dalam kancah yang kian kompetitif BPR tidak akan kehilangan peluang untuk berkembang. Perekonomian Riau masih tumbuh positif dan membaik dan didorong oleh kian meningkatnya pendapatan rakyat, khususnya disektor perkebunan. Membaiknya harga sawit dan karet serta komoditas pertanian lainnya berimplikasi pada meningkatnya pendapatan petani. BPR dapat menangkap kesempatan itu melalui diversifikasi produk yang ditawarkan dan menempatkan aspek kepercayaan dalam benak nasabah melalui pelayanan yang kian berkualitas. Strategi penting yang harus diterapkan oleh BPR adalah penetrasi pasar yang efisien dan semakin berlatih memahami kebutuhan dan keinginan nasabah potensial. Soal uangnya tidak hanya menyangkut siapa untung siapa rugi tetapi bagaimana semua pundi-pundi dapat terisi sehingga tak ada yang merasa rugi apabila dirugikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Pertumbuhan ekonomi juga belum akan sepenuhnya pulih sehingga sektor-sektor produktif masih lamban perkembangannya. Sektor riil masih akan terpengaruh oleh tensi politik yang kian tinggi dalam setahun politik mendatang. Pelaku bisnis akan “menggantung” gerakan mereka sambil membaca kemana arah pergerakan ekonomi pasca pileg dan pilpres.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





KIPRAH BANK SYARIAH DI RIAU

Syariah dengan dinamika perbankan secara nasional maupun daerah perkembangan bank syariah di Riau ternyata juga mengalami perlambatan, namun kinerjanya tetap menjanjikan. Saat ini baru ada lima bank syariah dan enam buah unit usaha syariah yang beroperasi di Riau. Secara nasional jumlah kantor bank syariah (BUS dan UUS) telah mencapai 2.495 kantor. Ini berarti keberadaan usaha perbankan syariah di Riau baru mencapai 0,44 persen. Sedangkan dibandingkan dengan keberadaan perbankan secara umum di Riau baru mencapai 1,38 persen. Jumlah aset telah mencapai Rp 5,42 triliun dan dibandingkan dengan tahun 2012 meningkat sebesar 27,9 persen. Pertumbuhan aset perbankan syariah Riau masih lebih rendah jika dibandingkan dengan perbankan syariah secara nasional yg tumbuh sebesar 35,01 persen.

Berkembangnya aset perbankan syariah Riau terjadi akibat naiknya dana yang dihimpun yakni mencapai Rp 3,94 triliun atau tumbuh sebesar 22,93 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sumbernya berasal dari tabungan maupun deposito syariah. Tabungan syariah masih mendominasi struktur aset perbankan syariah di Riau, yakni 55,41 persen. Secara nasional penambahan dana yang berhasil dihimpun atau Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 34,48 persen. Keadaan ini menunjukkan kinerja menghimpun dana perbankan syariah Riau masih dibawah rerata nasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Relatif penghimpunan dana yang begitu pesat mendorong naiknya kemampuan memberikan pembiayaan bagi usaha masyarakat. Perbankan syariah di Riau sampai dengan triwulan ketiga 2013 telah mampu mengucurkan pembiayaan syariah mencapai Rp 3,36 triliun atau meningkat 22,28 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan secara nasional sebesar 36,03 persen pertumbuhan Riau masih jauh lebih rendah. Penyaluran pembiayaan syariah ini disalurkan pada bidang usaha produktif yang mencapai 56,05 persen. Sisanya masih terserap untuk pembiayaan konsumtif yakni 43,95 persen. Pembiayaan produktif diarahkan pada pembiayaan modal kerja dan investasi. Perkembangan kedua bidang pembiayaan produktif ini masih signifikan. Pembiayaan modal kerja meningkat sebesar 10,07 persen dan pembiayaan investasi naik mencapai 43,43 persen. Sementara pembiayaan konsumtif tumbuh sebesar 18,37 persen.

Tantangan perbankan syariah di Riau kedepannya tentu tidak sedikit. Dalam skala mikro perusahaan, perbankan syariah di Riau dihadapkan pada upaya-upaya peningkatan kualitas bisnis dan menjaga konsistensi pertumbuhan yang sehat. Intermediasi yang dilakukan perbankan syariah dalam mendorong bergerakinya sektor riil di Riau sedikit mengalami penurunan yang ditandai dengan nilai *financing to deposit ratio (FDR)* yang semakin rendah dari 88,7 persen menjadi 85,37 persen. Ini artinya, ada potensi untuk terjadinya penurunan dalam pendapatan usaha. Pada sisi lain kualitas pembiayaan yang dilakukan juga kian memburuk. Tercermin dari naiknya rasio *non performing financing (NPF)* dari 3,89 persen menjadi 4,38 persen. Padahal rasio *non performing loan (NPL)* perbankan secara rerata di Riau hanya 3,48 persen.

Selain itu, peran perbankan syariah di Riau juga relatif kecil. Pangsa aset perbankan syariah di Riau terhadap total aset perbankan baru mencapai 6,72 persen dan hanya meningkat 4,67 persen jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dalam aspek kemampuan menghimpun dana pangsa perbankan syariah Riau baru sebesar 6,93 persen. Sedangkan



dalam aspek pembiayaan peran intermediasi perbankan syariah Riau hanya 7,07 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan pembiayaan usaha mikro peran perbankan syariah hanya sebesar 19,38 persen. Kondisi ini menandakan bahwa geliat yang tercermin dalam bisnis perbankan syariah masih dihadapkan pada kemampuan bersaing yang rendah dan tetap akan tertekan oleh pusaran arus bisnis perbankan konvensional yang kian deras.

Pada tataran makro ekonomi gerak langkah perbankan syariah untuk tahun 2014 masih akan dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan. Ketatnya likuiditas di pasar menyebabkan upaya-upaya meraup dana pihak ketiga akan semakin sulit. Perlu strategi-strategi yang unik dan terukur menghadapi situasi pasar yang “kering”. Dalam suasana seperti ini sulit menawarkan produk-produk perbankan dengan biaya murah. Pengetatan likuiditas memaksa terjadinya peningkatan bunga yang berujung pada naiknya bunga kredit atau pembiayaan. Tidak gampang menemukan sektor-sektor produktif yang bersedia menerima pembiayaan dengan *cost of fund* yang tinggi. Walaupun prinsip perbankan syariah adalah bagi hasil namun gangguan likuiditas ini tetap akan berdampak pada pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi juga belum akan sepenuhnya pulih sehingga sektor-sektor produktif masih lamban perkembangannya. Sektor riil masih akan terpengaruh oleh tensi politik yang kian tinggi dalam tahun politik mendatang. Pelaku bisnis akan “menggantung” gerakan mereka sambil membaca kemana arah pergerakan ekonomi pasca pileg dan pilpres. Alokasi anggaran negara dan APBD tentunya kurang tercurah pada upaya-upaya mendorong dinamika ekonomi. Porsi mendorong citra politisi dan partai akan lebih tercium. Bagi perbankan situasi ini kurang menguntungkan. Pemain-pemain didunia bisnis lebih tertarik pada bisnis-bisnis jangka pendek dan spekulatif sehingga lebih berisiko didanai melalui perbankan. Selektivitas pembiayaan menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah di Riau di tahun politik mendatang.

Strategi kedepan yang paling mungkin adalah menguatkan pondasi melalui penyusunan rencana kerja yang terinci, lengkap dan menyeluruh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.



Perbankan syariah harus lebih berhati-hati mengalokasikan pembiayaan.

1. Naiknya NPF menandai memburuknya kualitas bisnis nasabah atau bahkan menandai kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian selama ini. Untuk itu pemahaman yang baik tentang faktor-faktor eksternal bisnis perlu ditingkatkan dan kemampuan memetakan peluang-peluang dan sasaran pasar harus lebih trampil dan teliti.

2. Termasuk membaca ancaman-ancaman yang mungkin timbul sejalan dengan kelemahan yang masih menggelantung disisi internal perusahaan. Mendeskripsikan dengan baik segala kekuatan dan kelemahan dihadapkan pada cabaran eksternal merupakan faktor kunci keberhasilan memformulasikan langkah-langkah logis menggapai sukses. Keberhasilan bersaing hanya mungkin diperoleh dari upaya-upaya itu secara berkelanjutan. Determinasi pertumbuhan usaha yang masih tinggi dapat diberikan modal usaha yang memadai untuk kian memperbesar pangsa pasar. Ketatnya likuiditas bukan harus hanya sebagai tantangan, melainkan sebagai peluang yang menjanjikan mengingat karakteristik bisnis syariah sangat fleksibel menghadapi itu. Walaupun konsumen atau nasabah tetap saja lebih berorientasi pada pendapatan yang tinggi tetapi kemampuan mengelola risiko akan menjadi daya tarik yang menjanjikan.

Guna lebih mengembangkan sayap bisnis, kerja sama lintas sektoral yang lebih terintegrasi perlu dilakukan. Jika membiayai sektor perkebunan maka melirik sektor transportasi yang terkait dengan usaha perkebunan menjadi seksi untuk digarap. Mata rantai bisnis sektor riil harus dipetakan dan diteliti secara jeli untuk menemukan ceruk-ceruk pembiayaan yang produktif. Selain bermanfaat bagi bank itu sendiri upaya tersebut juga sangat berguna bagi perekonomian secara umum. Dengan demikian pemerintah dapat diajak untuk memberikan stimulus sehingga proses bisnis dalam siklus tersebut semakin likuid.

Pada level manajerial, loyalitas nasabah harus senantiasa dipertahankan sehingga keberlangsungan bisnis dapat berlanjut dengan baik. Bank syariah memiliki karakteristik tersendiri dalam lingkungan masyarakat muslim yang sangat besar jumlahnya. *Customer relationship*



tidak sulit dibangun melalui sentuhan-sentuhan emosional nasabah dan masyarakat. Hari-hari besar Islam dapat menjadi ajang membangun hubungan timbal balik antara kelompok nasabah dan perbankan. Ini seharusnya digarap intensif sehingga peluang mengembangkan usaha terbuka luas. Khusus untuk Riau membangun link dengan organisasi masyarakat berbasis Islam dan Melayu menjadi strategis dilakukan.

Amat penting diperhatikan selanjutnya adalah kualitas sumberdaya perbankan yang orientasi pengembangan harus terarah pada kualitas pelayanan. Kepuasan nasabah sangat erat kaitannya dengan loyalitas. Penelitian Towers Weston (Awaldi, 2014:56) bahkan membuktikan bahwa setiap 5 persen peningkatan kepuasan nasabah bank retail akan memberikan tambahan profit sampai dengan 25 persen.

Tanpa dukungan dan peluang lain dalam aspek kebijakan pemerintah bagi perkembangan bisnis perbankan syariah di Riau muncul dari niat pemerintah untuk mendirikan bank BUMN Syariah. Institusi ini nantinya akan menjadi sandaran bagi perbankan syariah diseluruh pelosok tanah air. Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan berbagai regulasi yang akan memberikan ruang ekspansi yang lebih luas bagi perkembangan bank syariah. Ini tentunya akan menjadi pendorong bagi menciptakan keunggulan bersaing dengan fitur-fitur yang kian melegakan nasabah mendukung usaha-usaha produktif mereka. Semoga...!

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Selama ini pertumbuhan ekonomi Riau sangat tergantung pada konsumsi rumah tangga. Kekuatan konsumsi domestik ini sangat dipengaruhi oleh naik turunnya harga tandan buah segar sawit. Ini berarti, korelasinya dengan ekspor sangat tinggi. Sebab, ekspor Riau sepenuhnya didominasi oleh ekspor lemak dan minyak nabati. Isu strategis utama dalam masalah ini adalah *supplementary livelihood* dan infrastruktur yang diperlukan untuk mewujudkannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



MENGEKSEKUSI VISI GUBERNUR RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tanpa terasa sudah empat bulan Riau dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur yang baru. Ekspektasi masyarakat tercurah pada bagaimana wilayah ini memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang lebih baik dan hidup kian sejahtera. Masyarakat tidak ingin seperti ayam yang mati dilambung padi dan juga enggan dikungkung oleh hegemoni kekuasaan. Namun, ternyata tidak gampang mengemas hari esok Riau cemerlang. Dalam acara berbuka bersama dengan segenap pengurus Lembaga Adat Melayu se Riau di Balai Adat baru-baru ini, secara jujur diakui gubernur bahwa belum ada hasil yang diperoleh selama menjabat tersebut. Muncul begitu banyak kendala untuk mewujudkan ekspektasinya. Artinya, ekspektasi gubernur sebagai pimpinan dan ekspektasi rakyat terhadap kepemimpinannya masih sama-sama seperti mengganjalang asap.

Jika dicermati langkah-langkah yang dilakukan memang terkesan masih parsial dan bernuansa “kick and run”. Berkunjung ke suatu tempat dan langsung mengumbar harapan untuk mengubahnya seperti keinginan rakyat yang dikunjunginya. Bahkan diawali oleh keinginan gubernur sendiri untuk “meng-kubah-kan” kantor gubernur yang dimulai dengan melumurnya dengan warna putih. Aparatur pemerintah provinsi kelihatan seperti tergapap untuk mewujudkan keinginan-keinginan



tersebut. Taklum lah bahwa proses pembangunan seharusnya dijalankan secara terencana dan terstruktur sesuai sistem dan mekanisme yang ada.

Pada sisi lain, kendala struktural yang dihadapi ternyata tidak kecil. Diawali dari proses politik anggaran dan penyusunan aparatur, gubernur dihadapkan pada kondisi yang kontroversial sehingga implementasi anggaran provinsi menjadi terkendala. Dampaknya terasa sampai sekarang dimana realisasi anggaran pemerintah Provinsi Riau sangat minim. Beban birokrasi dengan mental “penggaruk anggaran” juga tidak gampang diperbaiki. Memang diperlukan keberanian yang mumpuni untuk mencoret anggaran-anggaran yang bernuansa mubazir dan tidak bermanfaat bagi rakyat. Bagaimana pun upaya ini mengandung risiko metamahnya dukungan pengeluaran pemerintah terhadap dinamika perekonomian Riau.

Ini hanya, membenahi proses dan sistem pemerintahan secara masif akan berhadapan dengan tantangan keengganan berubah dari beberapa unsur stakeholder yang lain. Pada level pemerintahan yang lebih tinggi ternyata berbagai hambatan untuk membangun Riau juga masih erat mengebat. Ditandai dengan belum disetujuinya perubahan Tata Guna Hutan sehingga Rencana Umum tata Ruang (RTRW) tak bisa disahkan sampai pada cengkraman pemerintah pusat pada sumber-sumber ekonomi daerah, baik melalui kebijakan maupun masuk melalui cara berkolusi dengan pemilik modal telah menempatkan Riau dan masyarakatnya pada posisi yang terjepit. Semua ini tentunya memerlukan strategi dan kebijakan yang mumpuni dan terukur. Gubernur tidak bisa bekerja sendiri dengan celoteh dan gurauannya. Aparatur birokrasi harus mampu mengeksekusi visi gubernur mulai dari tahap perencanaan sampai proses pengendalian untuk memastikan visi tersebut memang betul-betul diimplementasikan.

Tidak begitu adil sebenarnya untuk memberikan nilai rendah kepada dalam keberhasilan mencapai kinerja selama empat bulan ini. Namun, dinamika masyarakat dan segala risiko yang ditimbulkannya tidak akan pernah mau menunggu sampai seorang gubernur betul-betul siap melokalkan pekerjaannya secara baik. Justru dalam serba ketidak-



beraturan itu seorang pemimpin harus bisa menemukan titik singgung dimana proses awal kearah perubahan akan dimulai. Dari titik “tapak lapan” tersebutlah langkah-langkah strategis keseluruhan arah akan dilakukan. Disinilah peran dari para “juru bisik” maupun orang-orang yang berada di jajaran struktural birokrasi. Mereka harus bisa memberikan masukan yang bernilai agar gubernur mampu berdiri pada “tapak lapan” tersebut dan memberinya sumber energi yang bergizi untuk mampu menapak “peta-jalan” yang mengarah pada pencapaian visi yang dulu digembor pada saat kampanye Pilgubri. Bila tidak maka gubernur akan seperti burung yang melompat dan terbang kesana-kemari dan berkicau dengan janji-janji pembangunan yang tak dapat diwujudkan secara struktural.

Selama empat bulan ini sudah banyak sekali harapan yang diumbar. Mulai dari membangun gedung-gedung universitas, membangun rumah-rumah rakyat miskin, dan terakhir adalah keinginan membangun gedung balai adat di setiap kecamatan. Pertanyaannya adalah strategiskah semua ini bagi kesejahteraan masyarakat Riau masa depan? Apakah hal-hal tersebut memang merupakan basis yang harus diperkuat untuk Riau dan masyarakatnya mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di era global mendatang ? Sesuailah semua itu dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah provinsi ? Menjawab semua pertanyaan itu dan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya adalah melalui apa yang dikenal dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sayangnya, apa yang tercantum dalam RPJMD yang saat ini lagi digodok untuk disepakati bersama persoalan-persoalan strategis Riau belum terkristalisasi dengan baik. Akibatnya, Riau bisa kembali kehilangan momentum untuk menangkap segala peluang yang ada. Padahal saat ini justru sangat dibutuhkan bagaimana mengubah dan memperspektifkan kendala dan tantangan menjadi peluang yang menguntungkan.

Dalam bidang perekonomian isu-isu strategis yang seharusnya menjadi perhatian pokok untuk diselesaikan adalah bagaimana



meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi benar-benar berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat. *Pertama*, ketimpangan yang tinggi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah harus diungkai agar tidak menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang justru bisa mereduksi produktivitas ekonomi yang ada. *Kedua*, struktur pendorong pertumbuhan harus lebih berimbang sehingga tidak semata-mata mengandalkan dominansi satu sektor semata. Selama ini pertumbuhan ekonomi Riau sangat tergantung pada konsumsi rumah tangga. Kekuatan konsumsi domestik ini sangat dipengaruhi oleh naik turunnya harga tandan buah segar sawit. Ini berarti, korelasinya dengan ekspor sangat tinggi. Sebab, ekspor Riau sepenuhnya didominasi oleh ekspor lemak dan minyak nabati. Ini strategis utama dalam masalah ini adalah *supplementary livelihood* dan infrastruktur yang diperlukan untuk mewujudkannya. Ini bukan semata-mata soal bagi-bagi duit dan bagi-bagi rumah untuk rakyat. Bukan soal keberanian mencoret anggaran bimtek, pelatihan dan perjalanan dinas yang mubajir. Persoalannya terletak pada *money follow the function* yang betul-betul menyentuh leverage perekonomian daerah.

Ketiga, berkenaan dengan penataan ulang aset ekonomi daerah yang saat ini sudah sangat hegemonik. Meski belum berhasil, sikap keras gubernur untuk mengesahkan RTRW adalah kebijakan yang tepat dan perlu didukung semua stakeholder. Tanpa peruntukan yang jelas dan terukur sesuai kondisi terkini maka pemetaan program pembangunan daerah akan menjadi sia-sia. Bagaimana mungkin mengembangkan kualitas infrastruktur bila peruntukan ruang tidak sesuai kenyataan. Sikap cerdas dan gubernur dalam masalah ini sangatlah strategis bagi redistribusi aset ekonomi di Riau.

Kempat, profesionalisme birokrasi dan koordinasi antar aparatur. Bagaimana mungkin suatu kebijakan dapat dilaksanakan bila dari satu sisi aparatur pemerintahan justru menjadi faktor penghambatnya. Masyarakat tentu tidak ingin visi gubernur menjadi tergerus oleh keengganan para pemangku jabatan untuk berubah. Namun, pimpinan daerah tentu tidak mudah untuk “main pecat” pejabat. Mekanisme dan sistem kinerja



harus dibangun untuk memotivasi terciptanya birokrasi yang handal dan profesional. Meski alergi sama anggaran Bimtek dan Pelatihan penguatan fungsi birokrasi tidak bisa lepas dari pembinaan yang berkesinambungan. persoalannya adalah bagaimana memilih proses pembinaan yang tepat sasaran, sukannya memberangus semua anggaran untuk perbaikan kualitas aparatur birokrasi.

Kelana, berkenaan dengan aspek kesinambungan. Era pemerintahan Jusli Zairul telah begitu banyak aset-aset daerah yang dibangun. Semua aktiva tersebut perlu dipakai dan digunakan agar mampu memberi kontribusi pada pembangunan daerah. Jangan sampai Riau seperti seorang bhuta yang dua kali kehilangan tongkat. Ketika dulu Riau menyelenggarakan MTQ nasional maka kawasan purna MTQ diharapkan dapat bermanfaat bagi penduduk tempatan. Sayangnya, justru yang terjadi adalah menjamunya kemaksiatan. Saat ini, berbagai aset tersebut telah menjadi beban tersendiri. Namun, pemerintah provinsi tidak bisa membiarkan semua itu menjadi sumber malapetaka baru. Harus dicari upaya yang cerdas guna mengkreasinya menjadi benilai. Mulai dari stadion-stadion yang beraburan, terminal agribisnis, Roro Dumai Melaka, BLK di setiap Kabupaten/Kota dan berbagai aktiva lainnya haruslah dimanfaatkan agar tidak hanya menjadi harta yang justru menguras uang rakyat. Semoga !

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.